



DPRD KOTA YOGYAKARTA
 SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

Wujudkan Kota Yogya Zero Stunting

YOGYA (KR) - Percepatan penurunan kasus stunting sudah menjadi salah satu program prioritas nasional. Meski prevalensi kasus stunting di Kota Yogya sudah berada di bawah rata-rata nasional namun target dalam menuju zero stunting pada tahun ini pun harus benar-benar dapat diwujudkan.

Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Yogya Muhammad Ali Fahmi SE MM, menjelaskan pihaknya juga memberikan perhatian yang cukup besar dalam mengawal progres penanganan kasus stunting di Kota Yogya. "Dalam rapat dinas bersama mitra kerja di eksekutif atau Pemkot Yogya, selalu kami tekankan sejauh mana kondisi riil stunting di Kota Yogya. Setiap ada persoalan atau kendala di lapangan untuk proses penanganan, harapannya bisa langsung dikoordinasikan supaya target zero stunting bisa terwujud," ungkapnya.

Target nasional dalam percepatan penanganan stunting prevalensinya mencapai 14 persen. Sedangkan di Kota Yogya saat ini sudah berada di bawah 12 persen. Setiap tahun juga terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan. Namun demikian untuk menuju target zero stunting hingga akhir

M Ali Fahmi SE MM
Fraksi PAN

KR-Istimewa

tahun dibutuhkan kerja keras dan sinergi berbagai pihak.

Fahmi menilai, meski stunting berkaitan dengan masalah gizi dan tumbuh kembang anak namun bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Hal ini karena penanganan kasus stunting tidak hanya menjangkau anak yang sudah terdeteksi melainkan faktor risiko yang menjadi penyebabnya. "Ketika sudah menargetkan zero stunting maka selain anak yang mengalami masalah tumbuh kembang berhasil ditangani, harus dipastikan juga setiap bayi yang lahir di Kota Yogya jangan sampai mengalami stunting. Sehingga memang butuh peran serius dari dinas lain hingga aparat di wilayah. Semua harus sinergis," paparnya.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa dipandang remeh lantaran sangat berdampak pada sumber daya manusia di Indonesia yang berdaya saing. Apalagi negara juga wajib menjalankan konvensi hak anak, salah satunya jaminan atas hak tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, sudah semestinya persoalan stunting menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah melainkan juga pengusaha hingga seluruh elemen masyarakat. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005